

**EVALUASI PROGRAM PPDB SISTEM ZONASI DI KABUPATEN SIDOARJO
MENGUNAKAN MODEL CIPP**

Atika Mujahidah, Mala Nur Kumairo, Mufarrihul Hazin
Program Studi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya
e-mail: mala.22067@mhs.unesa.ac.id

Abstrak: Penelitian Evaluasi Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di Kabupaten Sidoarjo bertujuan untuk menilai seberapa efektif dan efisien implementasi sistem zonasi PPDB dengan memanfaatkan Model CIPP (Context-Input-Process-Product). Kabupaten Sidoarjo, sebagai subjek penelitian, merupakan wilayah yang menghadapi tantangan yang signifikan dalam memastikan pemerataan akses pendidikan. Studi ini menginvestigasi berbagai aspek dari program PPDB, termasuk konteks sosial-ekonomi di Kabupaten Sidoarjo, masukan kebijakan yang diterapkan, jalannya proses implementasi program, dan pencapaian yang telah dicapai. Dengan menggunakan pendekatan CIPP, evaluasi dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan serta potensi perbaikan dalam pelaksanaan sistem zonasi PPDB. Data untuk evaluasi ini dikumpulkan melalui berbagai metode, seperti wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, analisis dokumen kebijakan, dan observasi langsung terhadap proses implementasi program. Harapannya, hasil evaluasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas sistem zonasi PPDB di Kabupaten Sidoarjo dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan serta pengembangan kebijakan di masa yang akan datang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, dalam usaha mereka untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan di Kabupaten Sidoarjo melalui evaluasi yang holistik menggunakan Model CIPP.

Kata Kunci: *Evaluasi, Sistem Zonasi, CIPP*

Abstract: The evaluation of the zoning system in Sidoarjo district aims to assess how effective and efficient the implementation of the zoning system is by using the CIPP (Context-Input-Process-Product) model. Sidoarjo district, as the subject of the study, is an area that faces significant challenges in ensuring equitable access to education. This study investigates various aspects of the PPDB program, including the socio-economic context in Sidoarjo district, the policy inputs, the program implementation process and the achievements made. Using the CIPP approach, the evaluation systematically identifies the level of success and potential improvements in the implementation of the PPDB zoning system. Data for this evaluation was collected through various methods, such as interviews with relevant stakeholders, analysis of policy documents, and direct observation of the program implementation process. It is hoped that the results of this evaluation can provide a deeper understanding of the effectiveness of the PPDB zoning system in Sidoarjo district and provide recommendations for future improvements and policy development. This research is expected to contribute to relevant stakeholders, including local government, educational institutions and communities, in their efforts to improve access to and quality of education in Sidoarjo district through a holistic evaluation using the CIPP model.

Keywords: *Evaluation, Zoning System, CIPP*

PENDAHULUAN

Pada Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Namun, saat ini, terjadi fenomena di mana sekolah-sekolah negeri yang dianggap unggul yang didirikan oleh pemerintah tersebar di hampir setiap kabupaten/kota. Hal ini menyebabkan kesenjangan yang jelas terlihat antara sekolah unggulan dengan sekolah lain yang tidak memiliki label tersebut. Sekolah unggulan cenderung menjadi pilihan bagi siswa dengan kemampuan akademik dan finansial yang lebih baik, sedangkan sekolah lain menghadapi kesulitan dalam menarik minat siswa. Dampaknya, terjadi ketidakseimbangan distribusi siswa di antara sekolah-sekolah, yang berpotensi merugikan sistem pendidikan nasional secara keseluruhan (Mutia, 2023).

Dalam menghadapi masalah tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga pendidikan menengah atas dan kejuruan. Langkah ini diambil untuk mengatasi ketidakmerataan distribusi siswa dan memastikan kesetaraan akses pendidikan bagi semua individu. Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi dianggap sebagai langkah yang tepat untuk mencapai pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan. Prinsipnya adalah untuk mendekatkan layanan pendidikan ke masyarakat dan memastikan bahwa mutu pendidikan tersebar merata. Sebagai respons terhadap pentingnya kebijakan ini, disusunlah Peraturan PPDB Zonasi. Peraturan ini memiliki konsekuensi jangka panjang dimana sistem zonasi pendidikan akan mengharuskan setiap sekolah memiliki peran dan fungsi yang sama dalam melayani semua peserta didik (Triwiniastuti & Sulasmono, 2020).

Dalam sistem zonasi PPDB, sekolah negeri yang dimiliki oleh pemerintah daerah diwajibkan menerima calon peserta didik yang berdomisili dalam radius zona terdekat dari sekolah tersebut, minimal 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Penetapan radius zona terdekat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan ketersediaan anak usia sekolah di wilayah tersebut dan kapasitas rombongan belajar di setiap sekolah. Meskipun demikian, sekolah diperbolehkan menerima peserta didik baru di luar zona terdekat, dengan porsi maksimal 5% untuk alasan prestasi dan maksimal 5% untuk alasan khusus, seperti perpindahan domisili orang tua atau wali. Sehingga peneliti tertarik untuk mengevaluasi program PPDB berbasis zonasi menggunakan model CIPP (Dialektika et al., n.d.).

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada analisis. Dalam penelitian kualitatif, memiliki focus utama pada perspektif subjek dimana peneliti menggunakan teori sebagai pedoman untuk memahami dan menggambarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan permasalahan yang timbul, peneliti akan menggunakan hal tersebut sebagai dasar untuk mengumpulkan data.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti melakukan observasi dengan mengunjungi Dinas Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo dan melakukan sesi wawancara dengan Kepala Bidang PPDB Kabupaten Sidoarjo yang bertanggung jawab di bidang PPDB Kabupaten Sidoarjo dan dilaksanakan pada hari Kamis pagi yang mana tempat dilakukannya observasi yaitu Jl. Pahlawan No.4, Jati, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur. Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai tujuan adanya sistem zonasi, alur pelaksanaan sistem zonasi di Kabupaten Sidoarjo, tantangan-tantangan pelaksanaannya, solusi

dari permasalahan yang muncul akibat diberlakukannya sistem zonasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Program

Evaluasi program adalah suatu teknik untuk menilai performa sebuah program dengan membandingkannya dengan standar atau tujuan yang telah ditetapkan, terhadap hasil yang telah dicapai. Hasil evaluasi ini, yang berupa informasi, digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan. Evaluasi dilakukan secara teratur dan terstruktur melalui proses pengumpulan dan analisis data yang dapat dipertanggungjawabkan, untuk menilai sejauh mana sebuah program telah berhasil mencapai tujuannya (Pendidikan & Konseling, n.d.).

Tujuan utama dari evaluasi program adalah untuk menilai apakah tujuan program yang telah direncanakan sebelumnya telah tercapai atau belum. Jika tujuan tersebut sudah tercapai, evaluasi juga bertujuan untuk mengevaluasi kualitas pencapaian kegiatan tersebut. Namun, jika tujuan belum tercapai, evaluasi akan menyoroti bagian mana dari rencana kegiatan yang belum terpenuhi dan mengidentifikasi penyebab ketidakberhasilannya. Dengan kata lain, evaluasi program bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian target-program yang telah ditetapkan. Penelitian evaluasi PPDB dengan model CIPP menunjukkan inovasi yang signifikan dibandingkan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain (Winarto et al., 2021). Fokus penelitian ini adalah mengembangkan evaluasi PPDB dengan model CIPP, dengan penekanan khusus pada aspek implementasi PPDB, sementara topik evaluasi sistem zonasi lebih banyak ditekankan daripada pembahasan mengenai instrumen penelitian (Retnawati, n.d.).

Model CIPP

Para ahli menggunakan berbagai model evaluasi program, dan salah satu yang sering digunakan dalam dunia pendidikan adalah model CIPP (Context-Input-Process-Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam (Fahrudin, 2020). Model CIPP memerhatikan empat dimensi utama, yakni Konteks, Input, Proses, dan Produk. Yang membedakan model ini adalah fokus pada keempat dimensi ini yang berkaitan dengan pengambilan keputusan terkait perencanaan dan operasional program. Model CIPP memiliki keunggulan dalam menyediakan format evaluasi yang komprehensif untuk setiap tahap evaluasi, memungkinkan para pengambil keputusan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kinerja suatu program (Satria et al., n.d.).

Model CIPP didasarkan pada prinsip bahwa tujuan utama dari evaluasi program bukanlah untuk membuktikan keberhasilan (to prove), tetapi untuk meningkatkan (to improve). Model ini merupakan salah satu model evaluasi yang sering digunakan dalam konteks evaluasi program pendidikan (Siregar et al., 2021). Instrumen evaluasi model CIPP yang digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan penilaian portofolio dan hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan penilaian portofolio sekolah yang ada di Sidoarjo berada dalam kategori baik (Anam & Rodiyah, 2024). Begitu juga dengan instrumen evaluasi model CIPP yang digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan penilaian proyek dan hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan penilaian proyek di sekolah yang ada di Sidoarjo berada dalam kategori baik.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan ditemukan evaluasi dari Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan model CIPP untuk program penerimaan peserta didik dengan system zonasi. Pada tahap **Context**, Tujuan kebijakan zonasi adalah untuk meningkatkan akses pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh anak usia sekolah di Kabupaten Sidoarjo, mempercepat pemerataan kualitas pendidikan, dan mengurangi disparitas pendidikan antar sekolah. Sarana dan prasarana, beberapa sekolah di Kabupaten Sidoarjo masih kekurangan sarana dan prasarana, seperti laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas. Hal ini dapat mengganggu pelaksanaan program

zonasi. Kualifikasi Guru, beberapa sekolah, terutama yang berada di daerah pinggiran, membutuhkan guru yang lebih berpengalaman. Hal ini dapat dicapai melalui program pengembangan profesi seperti pelatihan dan seminar. Karakteristik peserta didik, peserta didik di Kabupaten Sidoarjo beragam dari latar belakang sosial ekonomi, kemampuan akademik, dan kebutuhan belajar. Program zonasi harus mempertimbangkan hal ini agar semua peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas

Pada tahap **Input**, metode Pendaftaran Sekolah: Sistem zonasi memungkinkan pendaftaran siswa ke institusi pendidikan yang sesuai dengan wilayah tempat tinggal mereka. Pendaftarannya dilakukan bisa dilakukan secara online dan offline. Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo telah menyebarkan informasi tentang sistem zonasi melalui berbagai media, termasuk pertemuan dengan masyarakat dan website. Proses pengawasan, sebuah tim khusus dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan zonasi. Sekolah-sekolah memiliki tim yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses pendaftaran, penerimaan siswa, dan pelaksanaan pembelajaran. Penanganan masalah, Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo telah menangani sejumlah masalah yang muncul selama proses zonasi. Salah satunya adalah siswa yang tidak memiliki zona sekolah karena perpindahan domisili. Solusi termasuk memberikan dispensasi atau memindahkan siswa ke sekolah terdekat yang masih memiliki kapasitas lebih.

Pada tahap **Process**, akses pendidikan, jumlah siswa yang bersekolah di sekolah negeri, terutama sekolah-sekolah yang dulunya dianggap favorit, telah meningkat sebagai hasil dari program zonasi, yang telah meningkatkan akses pendidikan yang adil bagi seluruh anak usia sekolah di Kabupaten Sidoarjo. Kualitas pembelajaran, program zonasi telah meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dibuktikan oleh peningkatan nilai dan prestasi siswa di sekolah-sekolah tertentu. Kepuasan orang tua dan siswa, sebuah survei yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Sidoarjo menunjukkan bahwa orang tua dan siswa di Kabupaten Sidoarjo memiliki tingkat kepuasan yang berbeda terhadap sistem zonasi. Beberapa orang tua dan siswa senang dengan sistem zonasi karena membuat pendidikan lebih mudah dan murah. Namun, masih terdapat orang tua dan siswa yang merasa tidak puas terhadap sistem zonasi karena mereka merasa tidak mendapatkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan harapan mereka

Pada tahap **Product**, sistem zonasi di Kabupaten Sidoarjo masih dalam tahap awal implementasi dan masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Secara umum, program zonasi telah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan akses pendidikan yang adil dan kualitas pendidikan di Kabupaten Sidoarjo.

Program PPDB Sistem Zonasi

Kebijakan sistem zonasi dalam sistem pendidikan Indonesia dinilai sangat tepat dalam pemerataan pendidikan diseluruh wilayah di Indonesia. Seperti yang terlampir di website resmi kemendikbud, ada beberapa keluhan dari orang tua tentang penerapan sistem zonasi berdasarkan jarak rumah daripada nilai yang dapat merugikan prestasi siswa (Setiawati & Rahaju, 2022). Namun, masyarakat melihat kebijakan sistem zonasi sebagai upaya pemerintah untuk pemerataan pendidikan dan mengurangi kemacetan lalu lintas. Tujuan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB menurut Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dalam (Ardiansyah & Kristyaningrum, 2019) menyatakan kebijakan sistem zonasi yaitu menghapuskan adanya label sekolah favorit serta mewujudkan pemerataan akses pendidikan, keadilan dan mempercepat kualitas anak didik, tenaga pengajar serta sarana dan prasarana. Untuk melaksanakan PPDB, peraturan pemerintah tentang sistem zonasi digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan instrumen evaluasi. Peraturan Menteri Pendidikan (Permendikbud) No.

14 Tahun 2018 tentang PPDB untuk Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengevaluasi tingkat pencapaian program. Zonement, atau jarak antara rumah dan sekolah, adalah standar utama untuk penerimaan siswa dalam peraturan ini. Namun, nilai ujian nasional yang diperoleh di jenjang pendidikan sebelumnya tidak lagi menjadi pertimbangan utama.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan diketahui sejak tahun 2021, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, menggunakan sistem zonasi sebagai salah satu jalur penerimaan peserta didik baru (PPDB). Tujuan dari sistem ini adalah untuk meningkatkan kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh siswa usia sekolah di Kabupaten Sidoarjo. Namun, terdapat tantangan dalam pelaksanaannya di Kabupaten Sidoarjo. Ketersediaan sekolah negeri tidak merata di semua kecamatan. Hal ini menyebabkan beberapa siswa di daerah pinggiran menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pendidikan negeri yang baik. Banyak orang tua masih percaya bahwa sekolah negeri terbaik berada di pusat kota, sehingga mereka berusaha mencari celah agar anak mereka dapat masuk ke sekolah tersebut di luar zona tempat tinggal mereka. Hal ini menjadi masalah tambahan karena pemahaman masyarakat yang belum sempurna tentang sistem zonasi.

Solusi Permasalahan PPDB Pada Sistem Zonasi

Menurut Wahyuni dalam (Ardiansyah & Kristyaningrum, 2019) tentang solusi masalah sistem zonasi untuk PPDB. Sistem zonasi adalah salah satu upaya pemerintah untuk menjamin proses pemerataan kualitas pendidikan berjalan dengan baik, dan sistem ini diharapkan akan menghilangkan praktik jual beli bangku sekolah. Selain itu, sistem zonasi akan memudahkan pemetaan anggaran pendidikan, populasi siswa, dan tenaga pendidik oleh pemerintah. Dalam pelaksanaan pada sistem zonasi terdapat berbagai kendala yang harus diatasi. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan terdapat upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo dalam mengatasi kendala-kendala yang ada pada sistem zonasi yakni pertama, membuat pemetaan menyeluruh kebutuhan sekolah di setiap zona berdasarkan jumlah penduduk, usia sekolah, dan minat belajar. Selain ini mereka juga meningkatkan infrastruktur dan fasilitas sekolah negeri yang ada, terutama di wilayah pinggiran. Hal ini sesuai dengan pendapat (Wahyuni, 2019) variabel-variabel penentu kualitas pendidikan seperti kualifikasi dan distribusi guru, sarana, dan prasarana pendidikan perlu ditingkatkan.

Kedua, Dinas Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo juga melakukan peningkatan regulasi dan pengawasan sistem zonasi untuk mengurangi penggunaan data domisili dan menjamin penerapan sistem yang adil dan transparan dan meningkatkan kerja sama antar instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dispendukcapil, dan Satpol PP, untuk memastikan bahwa data adalah valid dan mencegah pelanggaran sistem zonasi.

Ketiga, Dinas Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo juga melakukan sosialisasi dan pendidikan terus menerus tentang sistem zonasi, manfaatnya, dan cara pelaksanaannya. Dimana hal ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Sesuai dengan pendapat (Nora, 2022) melaksanakan sosialisasi sistem zonasi dengan waktu yang panjang sebelum diterapkan, agar pemerintah daerah dan masyarakat memahami kebijakan tersebut secara komprehensif. Sistem zonasi bukan hanya tentang jarak, namun lebih jauh lagi untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Serta melakukan pengawasan dan mengevaluasi sistem zonasi secara teratur untuk menemukan masalah dan memperbaikinya. Untuk mendapatkan masukan yang bermanfaat, proses monitoring dan evaluasi melibatkan akademisi, pakar pendidikan, dan perwakilan masyarakat yang kemudian hasilnya akan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan

kebijakan dan pelaksanaan sistem zonasi di masa depan.

Dengan mempertimbangkan berbagai solusi di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah harus melakukan persiapan yang matang sebelum mengeluarkan kebijakan sistem zonasi. Pemerintah harus memberi tahu masyarakat tentang sistem zonasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum menerapkan kebijakan sistem zonasi, pemerintah harus meningkatkan infrastruktur satuan pendidikan yang ada dan sumber daya pendukung, seperti guru dan tenaga kependidikan, di setiap sekolah. Menghilangkan perbedaan antara sekolah favorit dan tidak favorit di masyarakat, terutama bagi orang tua, dengan menerapkan sistem zonasi.

PENUTUP

Evaluasi program adalah suatu teknik untuk menilai performa sebuah program dengan membandingkannya dengan standar atau tujuan yang telah ditetapkan, terhadap hasil yang telah dicapai. Tujuan adanya evaluasi program ialah untuk menilai apakah tujuan program yang telah direncanakan sebelumnya telah tercapai atau belum. Sistem zonasi di Kabupaten Sidoarjo memiliki beberapa peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas sekolah negeri di semua kecamatan melalui peningkatan infrastruktur sekolah, peningkatan kemampuan guru, dan penambahan sarana dan prasarana pendidikan. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus lebih gencar mensosialisasikan sistem zonasi kepada masyarakat secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Diharapkan sistem zonasi di Kabupaten Sidoarjo dapat mencapai tujuannya untuk meningkatkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak usia sekolah jika dilakukan dengan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, K., & Rodiyah, I. (2024). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh*, 199–213.
- Ardiansyah, A., & Kristyaningrum, D. H. (2019). Evaluasi program penerimaan peserta didik baru (ppdb) sistem zonasi di kabupaten Brebes menggunakan model CIPP. *Jurnal Dialektika Jurusan PGSD*, 9(2), 186–195.
- Dialektika, J., Pgsd, J., Ardiansyah, A., & Kristyaningrum, D. H. (n.d.). Evaluasi Program Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Sistem Zonasi Di Kabupaten Brebes Menggunakan Model Cipp.
- Fahrudin, F. (2020). Evaluasi Program Pembelajaran Sejarah Menggunakan Model Context, Input, Process, Product (CIPP). *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 8(2), 199. <https://doi.org/10.24127/hj.v8i2.2325>
- Mutia. (2023). Evaluasi Program Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Online Di Smpn 4 Kota Bengkulu Tahun 2021 (Studi Menggunakan Model Evaluasi Context Input Process Product). *Manajer Pendidikan*, 17(1).
- Nora, D. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi. *Jurnal Ecogen*, 5(3), 498. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v5i3.12904>
- Pendidikan, J., & Konseling, D. (n.d.). *Evaluasi Program Pendidikan (Vol. 4)*.
- Retnawati, H. (n.d.). *Evaluasi Program Pendidikan*.
- Satria, N., Pusat, P., Pendidikan, P. K., Kebudayaan, D., Info, J., & Glasser, J. P. (n.d.). Implementasi Ppdb Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan. <https://doi.org/10.32529/glasser.v%vi%i.186>
- Setiawati, N. D., & Rahaju, T. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Ppdb Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 609–620.

<https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p609-620>

Siregar, A. A., Munir, A., & dll. (2021). Evaluasi Program Dan Kelembagaan Pendidikan Islam (M. Lubis, Ed.; pertama). CV. Zigie Utama.

Triwiniastuti, C. S., & Sulasmono, B. S. (2020). Kelola Jurnal Manajemen Pendidikan Magister Manajemen Pendidikan FKIP Evaluasi Program PPDB Berbasis Zonasi di SMP Negeri 2 Pabelan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(1), 33–46.

Wahyuni, D. (2019). Permasalahan Dan Upaya Perbaikan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru 2019. *Info Singkat*, XI(1), 13–18.

Winarto, W., Yusufi, A., Khoirurrohman, T., & Kristyaningrum, D. H. (2021). Pengembangan Instrumen Evaluasi PPDB Model Context, Input, Process, Product (CIPP). *JURNAL PENDIDIKAN*, 30(2), 165. <https://doi.org/10.32585/jp.v30i2.1395>